

**IMPLEMETASI KEBIJAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES)DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI
DESA KASIH KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI
PAPUA BARAT**

Refita Karsau

NPP.30.1557

*Asdaf Kabupaten SorongProvinsi Papua Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email:karsau2000refita@gmail.com*

ABSTRACT

Problem/Background: Implementation of the village financial system application policy that has not gone well and there are still many village apartments that have not been able to use the village financial system application in village financial reporting. Objectives of this study are to identify and analyze and describe the implementation of village financial policies (SISKUDES) In Improving Village Government Performance, knowing and describing the obstacles that cause low quality of village financial reports and seeing village government performance and knowing solutions or solutions to obstacles encountered in implementing the Village Financial System application (SISKEUDES) In improving Village Government performance in Sorong Regency. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that many village apparatus are completely unable to use the application of the village financial system to report village financial reports and inadequate facilities and infrastructure. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data used are primary and secondary data obtained from interviews with the village approach and overseers from the Community and Village Empowerment Office. Then, it is adjusted to the results of observation and documentation. **Conclusion:** it can be 5r that the application of the Village Financial System (SISKEUDES) application in Improving Village Government Performance in Sorong Regency is still not optimal. adequate. So this is what causes the low quality of village financial reports. This research is expected to be input and improvement for the Office of Community and Village Empowerment

Keywords: Policy Implementation, Village Financial System Application (SISKEUDES), Quality of Financial Reports

ABSTRAK

Pemasalahan /Latar Belakang : Implemetasi Kebijakan aplaiaksi sistem keuanagan desa yang belum berjalan dengan baik dan masih banyak apart desa yag belum bisah menggunakan apliaksi sistem keuanagn desa dalam pelaporan keuanagn desa **Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskrisikan sejak mana Implemetasi Kebijakan Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa,mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang menyebabkan rendahnya kulaitas laporan keuanagn desa dan melihat kinerj pemerintahan desa dan mengetahui solusi atau pemecahan atas hambatan yang ditemui dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Sorong.**Hasil /Temuan:** Temuan yang dipeolrh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu banyak sekali aparatur desa sama sekali belum bisah menggunka apliksi sistem keuanag desa unruk melaoorakan lapaoran keuanagn desa dan sarana dan prasara yang belum memadai. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif .Data yang di gunakan adalah data primer dan primer sekunder yang diperoleh dari wawanvara dengan pendekatan desa dan pengawau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.Kemudia disesuaikan dengan hasil Pengamatan dan dokumentasi.**Kesimpulan:** bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Sorong masih belum optimal ,hal ini di sebabkan oleh kurangnya tingkat pemahaman aparat yang masih rendah mengenai SISKEUDES dan juga kurangnya fasilitas IT serta jaringan internet yang belum memadai.segingga hal inilah yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan Keuangan desa.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa

Kata Kunci : Implemetasi Kebijakan, Aplikasi Sistem Keuanga Desa(SISKEUDES),KualitasLaporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia bertekad untuk membangun mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai langkah awal bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan di terbitkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa ini bertujuan agar desa menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam pasal 7 ayat 3 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing desa

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Pada saat perkembangan daerah dimulai desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan asebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut

diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), 2015)

Dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di desa perlunya menggunakan dana secara maksimal agar tercapainya efektivitas dan efisiensi. Perlunya pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, dikatakan bahwa: "Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

(1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), 2015)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 2 menjelaskan bahwa dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Berdasarkan peraturan di atas pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dana desa yang dikelola secara tertib dijelaskan pula

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) Meskipun Desa Kasih sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa akan tetapi Desa Kasih masih menggunakan sistem manual yang di mana sistem manual tersebut dengan cara perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban maupun anggaran dengan microsoft office kemudian hasil tersebut di cetak dan kemudian diserahkan kepada perangkat daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, dan kurang terampil dalam mengoperasikan computer serta kendala fasilitas yang dimiliki Desa Kasih seperti jaringan internet jarak Desa Kasih yang cukup jauh untuk mencapai Kecamatan Aimas sehingga mengakibatkan lambatnya penyerapan teknologi yang disebabkan oleh jaringan internet yang belum tersedia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Aziza Novirania, Tahun 2018 dengan judul "IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN" dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik. Implementasi penerapan sistem keuangan desa menjadi lebih terpolakan dan terstruktur dengan baik karena setiap dana yang dikeluarkan harus diatandai dengan baik karena setiap dana yang dikeluarkan harus diatandai dengan surat perintah pembayaran, implementasi penerapan sistem keuangan desa menjadi masih ditemukan kelemahan pada indikator komunikasi yang disampaikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh program, serata kelemahan aplikasi yang rentan virus dan aplikasi tersebut belum online sehingga tidak terhubung langsung dengan Pemkab.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian dahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pembahasan secara spesifik implementasi kebijakan seleksi terbuka dan

penggunaan sistem merit saat pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dan,serta hambatan –hambatan yang dialami dalam implemetasi kebijakan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauziah Ridwandy,Bovie Kawulusan,dan Rafian Juni lebih cenderung membahas mekanisme pelaksanaannya serta seberapa efektivitasnya ppelasan seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda juga dari peneliti sebelumnya yakni menggunakan Teori Edwards III (1980) dengan empat dimensi yakni Komunikasi,Sumber Daya,Disposisi, dan Struktur Birokra.

1.5 Tujuan

Aplikasi SISKEUDES dapat mengakomodasi proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Output yang dihasilkan dari SISKEUDES merupakan bukti bahwa akuntabilitas dapat dicapai dengan implementasi SISKEUDES. tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

II. METODE

Aplikasih Siskeudes diajukan kepada aparat pemerintahan desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawab. Prosedur penggunaan Aplikasih Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerinth daerah untuk penggunaan aplikasih Siskeudes kepada kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya Kepala Desa dan perangkat Desa, tetapi juga masyarakat yang ada di Desa Aim dan Kasih . Data data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan Kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam praktek ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan model implementasi penerapan kebijakan George C Edward III. Pengelolaan keuangan desa seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desmenjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tempat penelitian di Desa Aimo dan Desa Kaish Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di desa Aimo

merupakan desa yang sudah dapat memberdayakan pengelolaan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) sedangkan di desa Kasih merupakan desa yang lambat dalam pengolahan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan Aplikasinya yang rumit serta kurangnya pelatihan mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDsxES). Adapun orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara 21w sebagai berikut Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa, dan Bendahara desa, Ketua BPD Desa, dan Masyarakat Desa, serta data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Keunag Desa (siskeudes) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Kasih Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) dengan empat dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

3.1 Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam menetapkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut berhubungan dengan upaya dalam menyampaikan informasi tertentu sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sorong sudah berjalan dengan baik contohnya pemerintah desa desa sendiri meminta kepada dinas pemberdayaan asyarakat desa sendiri untuk turun langsung mengajarkan aparata desa untuk bagamna cara menggunakan apliaksi siskeudes sendiri dalam pelaporan keunagan desa

3.2 Sumber Daya

Setelah komunikasi telah disampaikan dengan jelas, baik, dan konsisten, kemudian para pelaksana harus memiliki sumber daya yang memadai dalam implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya paling utama. Pada pelaksanaan implementasi kebijakan Selanjutnya sumber daya yang diperlukan adalah informasi yang menjadi sumber dalam pengimplementasian kebijakan public. Kualiatas Sumber Daya manusia di Desa Kasih sendiri masih sangangat kenapa dikatakan sangkat kurang karena mereka belum bisah menggunakan teknologi dalam pembuatan lapaoran keunagan desa menggunakan computer atau leptop dan pemerintah

desa sendiri meminta bantuan oranglain untuk membantu dalam pembuatan dalaporan keuangan desa.

3.3 Disposisi

Sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Supaya efektif, para pelaksana harus memiliki sikap dan dukungan baik dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka mereka akan melaksanakan proses implementasi kebijakan tersebut dengan baik seperti tujuan kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan begitupun sebaliknya. Selain itu, pengangkatan birokrat dan intensif juga mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan membuat pelaksana kebijakan memiliki komitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika faktor Disposisi dimana dalam hal ini DPMD Kabupaten Sorong bertanggung jawab untuk melatih dan membimbing setiap desa dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dan diberikan insentif yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang berlaku sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politis dan terkoordinasi dengan baik. Birokrasi tidak hanya ada di lingkungan instansi pemerintah pemerintah tetapi juga di organisasi atau perusahaan swasta, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Berikut 2 (dua) karakteristik dari birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi yakni *Standar Operating Procedures (SOP)* dan Fragmentasi. Selama menjalankan tugas dan kerja desa pemerintahan desa sudah sesuai dengan *SOP*.

3.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Keunagan Desa (siskeudes) dalam meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Desa Kasih di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Ada beberapa factor penghambatan dalam implemetasi kebijakan aplikasi sistem keunagan desa itu sendiri factor penghambata itu diantaranya

1. Sarana dan Perasarana yang belum memadai
Kurangnya sarana praarana atau fasilitas pendukung untuk menerapkan seskeudes sarana sarana itu dianatranya adalah akses jaringan internet yang tergolong sulit untuk penginputan data

karena proses penginputan data siskeudes secara online walaupun dulunya dilakukan secara offline.

2. Kurangnya tenaga pendamping bagi desa untuk menerapkan siskeudes.

Tenaga pendamping merupakan tenaga yang disiapkan untuk mendampingi desa melaksanakan program kerjanya teksidalam penyusunan RAB dan tenaga pendamping lainnya.sama halnya dengan hal tersebut implemetasi siskeudes pun membutuhkan teanga pendamping yang memiliki keahlian dalam bidang IT dan memahami tentang keuangan desa .hal ini menjadi kendala sehingga pengelolaan keuangan desa di kabupaten sorong masih lambat implemetasinya

3. Rendanya Tingkat Sumber Daya Manusia Pada perangkat Desa
Permasalahan yang utama dalam mengimplentasi siskeudes adalah SDM para perangkat desa .Hal ini berkaitan dengan tingkat pemahaman perangkat desa terhadap aplikasi siskeudes lebih rendah salah satu factor yang menyebabkan hal tersebut adalah rendanya tingkat pendidikan perangkat desa serta adanya fenomena gagp teknologi (gaptek) yang selama ini memang telah terjadi diwilayah pedesaan karena teknologi merupakan salah satu yang baru saja ditemui dan dipraktekan langsung oleh perangkat desa.

3.6 Upaya yang dilakukan

1. Menyeiakan Jaringan Internet yang memadai

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong turut berperan dalam mengatasi terkat hambatan jaringan internet .Maka mereka berusaha untuk membangun jaringan agar penrpan Siskeudes dapat berjalan secara efektif dan efesien .Karena pada umunya penggunaan Siskeudes terkendala oleh buruknya kualitas jaringan internet

2. Menyediakan Tenaga Pendamping Khusus Siskeudes

Dinas PMK bekrjasama dengan berbagai pihak serta inas Kepegawalan dan para wisudawan untuk dapat menyediakan tenaga pendamping yang memiliki keahiln dibidang IT dan memahami terkait Keunagn Desa. Dengan tenaga pendamping tersebut maka mempermudah pernagkat desa dalam megimplemtasikan Siskeudes karena didampingi secara langsung sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang baik

- 3.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
Setiap Penegelolaan Keuangan Desa harus bias tertib dan disiplin dalam pengeluaran setiap anggran ,harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahkan diinginkan .Bertujuan untuk memakmurkan desa,berkaitan dengan hajat orang bnayk dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu ,perlu adanya sistem pengelolaan desa sebagai bahan acuan .Diaman SDM di desa haru bisah mengoperasikan aplikasi khususnya mengelola desa esa dari pemerintah pusat .inlah yang membuat adanya diklat Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES),yang akan meberikan pemahaman dan praktik langsung bagaimana cara mengelola dana yang msuk dengan tepat

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implemetasi kebijakan apliaksi siskeudes sendiri sudah berjalan di kabupaten sorong namun dalam proses penggunaanya masih sangat perluh diawasi dan perluh diajar dan dibimbing supaya semua aparat pemerintah desa bisah dapat menggunakan aplikasi siskeudes ini dalam pelaporang keuangan desa dan tidak hanya itu saja sarana dan prasaran yang masih kurang perluh ditadaklanjutkan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam implementasi Aplikasi Sistem Keuangan apliksih sistem keuangan desa atau yang dikenal dengan siskeudes kabupaten sorong sendiri sudah menggunakannya sejak awaal tahun 2019 akan tetapai pelaksanaannya belum berajalan dengan baik kususnya di desa kasih yang merupakan sampel dari peneletian saya kedala yang dihapi oleh pemerintahan desa sendiri yaitu

ksara dan prasara yang belum memadahi yaitu jarinagn unternet yang belum terjagkau sampe ke wilayah desa tersebut itu yang meyusakan aparat desa dalam melakukan penginputan pelaporan keuangan desa para aparat desa msih menggunkan cara manua dalam pelaporan keuangan desa ldan juga sumber daya manusia yang kurang mampuh dalam menggunakan tekologi yaitu belum bisah menggunakan lebtop sebagai media dalam pelaporang keuanagn .Dinas Pemebrdayan Masyarakat Desa selalu melakuakn pembinaan atau pelatihan aplaiksi siskeudes kepada para aparat desa agar tidak hanya operator aplikasi saja yang tau akantetapi semua aparat desa dapat mengetahui bagaimana cara penginputan pelaporan keuanagan desa menggunakan apliaksi sistem keuanagan desa.

Ketersabatan Penelitian.Penelitian ini memiliki ketebatasan uatama yakini letak desa yang kurang bisah dijangkau karena kerbatasan kondisi jalan yang rusak .

Arah Masa Depan Penelitian .Penulis menyadari masi awalnya temuan penelitianoleh karena itu penulis menyarangkan agar dapat dilakuakn penelitian lanjuatn pada lokasi serupa yang berkaitan dengan impemetasi dari kebijakan apliaksi siskeudes.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong dan Juga Desa Kasih beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 448-457.

Juardi, M. S. S., (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (studi pada desa jenetallasa kec. pallangga kab. gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).

Lukito, C. (2018). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 36-42.

Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

Trisna, N., & Wahyuni, R. (2019). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1).